

# Diplomasi

BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI  
KEMENTERIAN PERTANIAN

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS, THE MINISTER FOR AGRICULTURE, AND THE H

ISTANA KEPRESIDENAN JAKARTA

THURSDAY, JU  
13:1

MEDIA CENTER  
COVID-19



Menteri Pertanian RI menyampaikan press briefing dengan media asing terkait ketahanan pangan nasional di tengah pandemi COVID-19 (4/6/20)

4

COVID-19

Press Briefing Mentan dan Menlu  
terkait Kebijakan Sektor Pertanian  
Indonesia

15

Fasilitasi Akses Pasar

Pengembangan e-Commerce untuk  
Fasilitasi Ekspor  
Produk Pertanian

23

Kerja Sama Teknis &  
Investasi

Brief Update Kerja Sama dengan  
Denmark, Korsel, Fiji dan Inggris

# Diplomasi

Di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, Kementerian Pertanian c.q. Biro Kerja Sama Luar Negeri dengan berbagai *adjustment*, tetap berupaya mendorong akselerasi ekspor komoditas pertanian melalui serangkaian kegiatan kerja sama fasilitasi akses pasar serta mobilisasi bantuan teknis dan investasi. Catatan kegiatan tersebut telah dirangkum dalam buletin Diplomasi edisi ke-6 tahun 2020 dengan gambaran umum berikut.

Menteri Pertanian (Mentan) RI bersama Menteri Luar Negeri RI melakukan *press briefing* di hadapan media asing mengenai ketahanan pangan nasional di tengah pandemi COVID-19. Pada *Extraordinary Agriculture Ministers Meeting G20*, Mentan juga turut mendukung upaya bersama untuk memperkuat sistem pangan global di masa pandemi. Program dan kebijakan dalam penanganan dampak COVID-19 terhadap sektor pertanian juga telah diupayakan bersama lembaga internasional mitra Kementerian Pertanian, termasuk IFAD.

Dalam hal fasilitasi akses pasar, penguatan koordinasi dengan negara-negara mitra tetap dijalankan melalui serangkaian pertemuan virtual. Selain itu, dilakukan pula pengembangan *platform e-commerce* sebagai media untuk mengglobalkan produk pertanian Indonesia. Upaya tersebut juga telah diperkuat melalui mobilisasi dukungan para Atase Pertanian di Brussel, Tokyo, Roma, dan Washington DC.

Terkait kerja sama teknis dan investasi, Indonesia telah mengikuti pertemuan virtual ASEAN SPS *Contact Points* (ASCP) ke-8 dan ATIGA *Committee on Sanitary and Phytosanitary* (ACSPS) sebagai *update* dan menyampaikan perkembangan peraturan perundangan terkait *Sanitary and Phytosanitary*. Indonesia juga telah menyepakati beberapa inisiatif proyek kerja sama dengan negara-negara mitra diantaranya Korsel, dan Denmark dalam bentuk *joint research, field study, invitational training* dan *workshop*.

Di samping berbagai kegiatan tersebut, kajian terkait *Public Stockholding* (PSH) sebagai persiapan posisi Indonesia dalam KTM WTO juga sedang dilakukan. Selain itu, kajian mengenai kemampuan ketahanan pangan nasional dan global dalam menghadapi pandemi dengan menggunakan perspektif metode *nowcasting* juga telah mulai dilakukan. Buku Profil Indikasi Geografis (IG) sebagai sarana promosi produk pertanian juga telah diterbitkan.

Seluruh kegiatan yang terus diupayakan dalam situasi pandemi COVID-19 ini diharapkan dapat berkontribusi dalam usaha untuk menjadikan Pertanian yang Maju, Mandiri, dan Modern.



## Dr. Ade Candradijaya

Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri  
Kementerian Pertanian


## Redaksi

Tim Pengelola Informasi, Dokumentasi dan  
Buletin (PIDB)

Biro Kerja Sama Luar Negeri,  
Sekretariat Jenderal - Kementan RI

Saran dan kritik dapat disampaikan melalui  
email [publikasi.kln@gmail.com](mailto:publikasi.kln@gmail.com)

Media Sosial Biro KLN

 KLN Pertanian



## COVID-19

- *Press Briefing* bersama Menlu, Mentan Paparkan Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional di tengah Pandemi COVID-19 4
- Mentan Dukung Upaya Global Perkuat Sistem Pangan di Masa Pandemi pada *Extraordinary Agriculture Ministers Meeting G20* 5
- Sekjen Hadiri Sidang *Executive Board*, IFAD Luncurkan Program untuk Petani Kecil Terdampak COVID-19 6
- Indonesia Bagikan Pengalaman Penanganan Dampak COVID-19 terhadap Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Forum COMCEC 7
- Kebijakan Donor terhadap *On-going Projects* yang Terdampak COVID-19 8

## Fasilitasi Akses Pasar

- Pengembangan *Platform e-Commerce* untuk Fasilitasi Ekspor Produk Pertanian & Kementan Gandeng Lazada dan Alibaba Perluas Pasar Produk Pertanian 9 - 12
- *Brief Update* Penguatan Akses Pasar ke Negara-Negara Mitra 13 - 15
- Forum Koordinasi dengan Atase Pertanian Tokyo, Brussel, Roma, dan Washington DC dalam rangka Mendukung Peningkatan Ekspor Komoditas Pertanian 16
- Upaya Akselerasi Ekspor Mangga untuk Menembus Pasar Jepang 17 - 18
- Kajian *Public Stockholding (PSH) for Food Security Purposes* 19

## Kerja Sama Teknis dan Investasi

- *Brief Update* Penguatan Kerja Sama Teknis dan Investasi dengan Negara-Negara Mitra 20 - 21
- *Brief Update* Penguatan Kerja Sama Teknis dan Investasi dalam Kerangka Multilateral 22 - 23
- Pertemuan *Virtual ASEAN SPS Contact Point (ASCP) ke-8* dan *ASEAN Committee on SPS (AC-SPS) ke-10 Tahun 2020* 24
- Peningkatan Kualitas Ekspor Bidang Tanaman melalui ASEAN Sectoral Working Group on Crops (ASWGC) ke-27 25
- *English Language Training for Officials Programme (ELTO)*, Kerja Sama Indonesia dengan New Zealand 26

## Highlights Biro KLN

- Sinkronisasi Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Selaraskan RPJMN 2020-2024 27
- Penerbitan Buku Profil Indikasi Geografis (IG) sebagai Sarana Promosi Produk Pertanian 28
- Kajian *Nowcasting* Kemampuan Ketahanan Pangan Nasional dan Global dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 29

## Agenda Kegiatan (Juli - Agust - Sept 2020) 30 - 31

## **PRESS BRIEFING BERSAMA MENTERI LUAR NEGERI, MENTERI PERTANIAN PAPARKAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL DI TENGAH PANDEMI COVID-19**



Menteri Pertanian RI di hadapan media asing menyampaikan situasi pangan dan pertanian Indonesia yang dinilai cukup berhasil dari segi pasokan dan kestabilan harga di tengah pandemi COVID-19, khususnya selama Bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Kementan juga telah menyiapkan skema penanggulangan kemungkinan adanya krisis pangan global akibat pandemi sebagaimana disampaikan *Food and Agriculture Organisation* (FAO). Hal ini disampaikan Mentan pada *press briefing* dengan Menteri Luar Negeri tanggal 4 Juni lalu di Istana Kepresidenan Jakarta.

Selain penerapan *COVID-19-adapted working protocol* di lingkup Kementan untuk mengurangi penyebaran COVID-19, Mentan menginstruksikan langkah operasionalisasi kebijakan untuk memastikan keberlangsungan usaha petani melalui fasilitasi pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR); pemberian bantuan dalam bentuk modal usaha tunai; benih dan pupuk; serta alat mesin pertanian.

Sesuai dengan mandatnya, Kementan juga terus melakukan *extraordinary efforts* untuk menjaga ketahanan pangan nasional bagi 267 penduduk Indonesia. Dalam hal ini, Mentan menginstruksikan empat “*Cara Bertindak*” strategis yang diharapkan akan menekan dampak pandemi COVID-19 di sektor pertanian, yaitu:

Pertama, **peningkatan kapasitas produksi** melalui: (i) ekstensifikasi pertanian, diantaranya pengembangan lahan rawa untuk pangan (*food estate*), serta Perluasan Areal Tanam Baru (PATB) padi, jagung, bawang merah, dan cabai di daerah defisit; serta (ii) intensifikasi pertanian melalui kegiatan percepatan padi pada masa tanam (MT) II 2020, dan peningkatan produksi gula, daging sapi dan bawang putih untuk mengurangi impor.

Kedua, **diversifikasi konsumsi pangan (*staple food*)** melalui: (i) pengembangan diversifikasi pangan berbasis kearifan lokal yang tidak terfokus pada satu komoditas; (ii) pemanfaatan pangan lokal secara masif seperti ubi kayu, jagung, sagu, pisang, kentang dan sorgum; serta (iii) pemanfaatan lahan pekarangan dan marjinal melalui Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).

Ketiga, **penguatan lumbung pangan dan sistem logistik pangan** melalui: penguatan cadangan beras pemerintah provinsi; pemerintah daerah; dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan LPM berbasis desa bekerja sama dengan Komando Strategi Pembangunan Penggilingan Padi (Kostraling); serta penguatan sistem logistik pangan nasional untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan.

Keempat, **pengembangan pertanian modern** diantaranya melalui: (i) mekanisasi pertanian; (ii) pengembangan *smart farming*; (iii) pengembangan *screen house* dan *green house*; dan (iv) pengembangan korporasi petani.

## MENTAN DUKUNG UPAYA GLOBAL PERKUAT SISTEM PANGAN DI MASA PANDEMI PADA *EXTRAORDINARY AGRICULTURE MINISTERS MEETING G20*



Menteri Pertanian RI saat mengikuti Extraordinary Agriculture Ministers Meeting G20 di Makassar

Sebagai bentuk komitmen bersama untuk merespon dampak ketahanan pangan dan gizi dalam menghadapi pandemi COVID-19, pertemuan *Extraordinary Agriculture Ministers Meeting G20* Presidensi Arab Saudi diselenggarakan secara virtual pada tanggal 21 April 2020. Pertemuan diikuti oleh seluruh Menteri Pertanian anggota G20, organisasi internasional, negara tamu dan beberapa organisasi regional.

Forum ini merupakan upaya untuk menyampaikan pesan yang penting dan meyakinkan kepada dunia tentang tekad negara-negara G20 dalam mengambil langkah proaktif untuk mengurangi resiko krisis berkepanjangan yang mungkin sangat berdampak pada sistem pangan global di negara-negara di seluruh dunia.

Pertemuan berhasil merumuskan upaya bersama dalam merespon dampak krisis global akibat pandemi COVID-19 terhadap ketahanan pangan dan gizi pada negara-negara terdampak.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian menyampaikan tiga langkah memperkuat sistem pangan yang diadopsi dalam dokumen Deklarasi Menteri Pertanian G20 sebagai berikut:

### 3 Langkah Memperkuat Sistem Pangan



1

Memprakarsai pemulihan sistem pangan global untuk menjamin produksi pangan yang tinggi, rantai pasok pangan global yang kembali normal, dan perdagangan pangan internasional tanpa hambatan sesuai dengan aturan WTO



2

Mendorong investasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, juga meningkatkan peran sektor swasta melalui kemitraan *public-private partnership* di bidang pangan dan pertanian



3

Meningkatkan transfer teknologi & pengembangan kapasitas, terutama kepada negara-negara yang membutuhkan, untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing

## SEKJEN HADIRI SIDANG *EXECUTIVE BOARD*, IFAD LUNCURKAN PROGRAM UNTUK PETANI KECIL TERDAMPAK COVID-19

Sebagai satu-satunya lembaga keuangan internasional PBB yang khusus bergerak di sektor pertanian, *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) berkomitmen untuk bergerak secara cepat, tepat, dan tanggap dalam merespon pandemi COVID-19 dan mencegah terjadinya krisis pangan sebagai akibat pandemi. Sebagai bentuk konkret respon cepat terhadap pandemi, IFAD meluncurkan program **Rural Poor Stimulus Facility (RPSF)** pada pertemuan sesi ke-129 *Executive Board* (EB) tanggal 20-23 April 2020 yang diselenggarakan secara virtual. Program RPSF bertujuan sebagai mitigasi efek pandemi COVID-19 terhadap keberlangsungan proyek-proyek IFAD yang sedang berjalan (*on-going projects*) melalui bantuan input serta fasilitasi akses pasar, keuangan dan informasi.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Presiden IFAD, Gilbert F. Houngbo, dan dihadiri 36 perwakilan negara anggota Dewan Eksekutif IFAD, Presiden menyampaikan IFAD akan terus memberikan dukungan dan panduan bagi negara anggota dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Program RPSF didukung oleh anggota EB.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian selaku *Executive Director* IFAD di Indonesia menyampaikan komitmen Indonesia untuk menekan dampak negatif COVID-19 yang menimpa petani dan mengancam kestabilan sistem pangan, diantaranya melalui: (i) memastikan kestabilan ketersediaan pangan antara lain dengan optimalisasi pemanfaatan *e-commerce*; (ii) peningkatan program jaringan pengamanan sosial bagi petani; dan (iii) penyesuaian terhadap implementasi proyek yang didanai oleh IFAD, diantaranya melalui pemanfaatan teknologi untuk pelatihan para petani.



Terkait program RPSF, Indonesia mendukung kebijakan IFAD ini dan akan mengeksplorasi lebih jauh dengan Kantor Perwakilan IFAD di Indonesia serta KBRI Roma mengenai kemungkinan dukungan program tersebut bagi Indonesia serta memastikan pelaksanaan 4 (empat) *on-going projects* berbantuan IFAD yang dikelola Kementan dapat beradaptasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai dengan situasi pandemi saat ini.

## KEBIJAKAN DONOR TERHADAP *ON-GOING PROJECTS* YANG TERDAMPAK COVID-19

Pandemi COVID-19 turut berdampak terhadap keberlangsungan proyek Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Sebanyak 6 (enam) proyek Pinjaman Luar Negeri mengalami keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga berdampak kepada realisasi yang rendah di masa pandemi ini. Keenam proyek tersebut yaitu:

1. ***Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP)***
2. ***Flood Management in Selected River Basin (FMSRB)***
3. ***Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling-up Initiative (READSI)***
4. ***Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP)***
5. ***Youth Entrepreneurship and Employment Services (YESS)***
6. ***Uplands Agriculture Productivity and Markets Project (UPLAND)***

Tercatat pada aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Pinjaman Hibah Luar Negeri (SIPOR PHLN) triwulan I TA 2020, dari keenam proyek tersebut, lima di antaranya berstatus *at risk*, di mana realisasi penarikan pinjaman dan/atau hibah mengalami keterlambatan yang akut sehingga berisiko memunculkan biaya tambahan yang harus ditanggung APBN.



Melihat rendahnya realisasi anggaran tersebut, Biro Kerja Sama Luar Negeri berupaya untuk melakukan berbagai upaya dengan pihak pengelola pinjaman luar negeri di lingkup Kementan dengan melibatkan *Lender/Donor* untuk bersama-sama merumuskan langkah-langkah strategis agar tujuan proyek tetap dapat terlaksana dengan baik meskipun dalam situasi pandemi COVID-19.



Kendala yang dihadapi proyek PHLN di masa pandemi ini utamanya terkait mekanisme *on granting* pada beberapa proyek. Penyediaan dana talangan di satker daerah yang sedianya untuk kegiatan proyek direalokasi pemanfaatan anggarannya untuk penanganan wabah COVID-19 di wilayahnya. Namun demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan melalui konsultasi dengan pemerintah pusat untuk menyasiasi kondisi saat ini.

Kebijakan yang telah disepakati contohnya seperti yang diterapkan pada proyek FMSRB. Ditjen PSP telah menentukan pencairan anggaran dari kelompok penerima manfaat ke satker daerah. Besaran *reimbursement* yang semula melalui tiga tahapan pencairan, yaitu sebesar 40%-30%-30%, saat ini diberlakukan kebijakan pengembalian 100% jika pengajuan pengembalian di bawah nilai 100 juta. Proyek ini juga melakukan beberapa revisi kegiatan, seperti menambah tenaga penyuluh lapangan di daerah (fasilitator). Contoh lain adalah penguatan Kostratani yang dilakukan pada proyek IPDMIP.

Saat ini, untuk kelancaran kegiatan proyek, pihak donor mendukung upaya-upaya yang dilakukan Kementan untuk penyesuaian kondisi tersebut, selama output tetap sejalan dengan tujuan awal proyek.



KEMENTERIAN PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

# Jaga Pangan UNTUK NEGERI DI TENGAH PANDEMI COVID-19



Sesuai arahan Pak Jokowi, Kementan mengawal dengan ketat pasokan dan stok pangan. Masyarakat mohon agar tenang dan tidak perlu resah. Pasokan dan stoknya ada

*Syahrial Yasin Limpo*  
Menteri Pertanian RI



Semua kementerian dan lembaga negara untuk memprioritaskan kebutuhan pangan sebagai pasokan masyarakat selama proses pengendalian penyebaran covid-19 di Indonesia

*Joko Widodo*  
Presiden RI



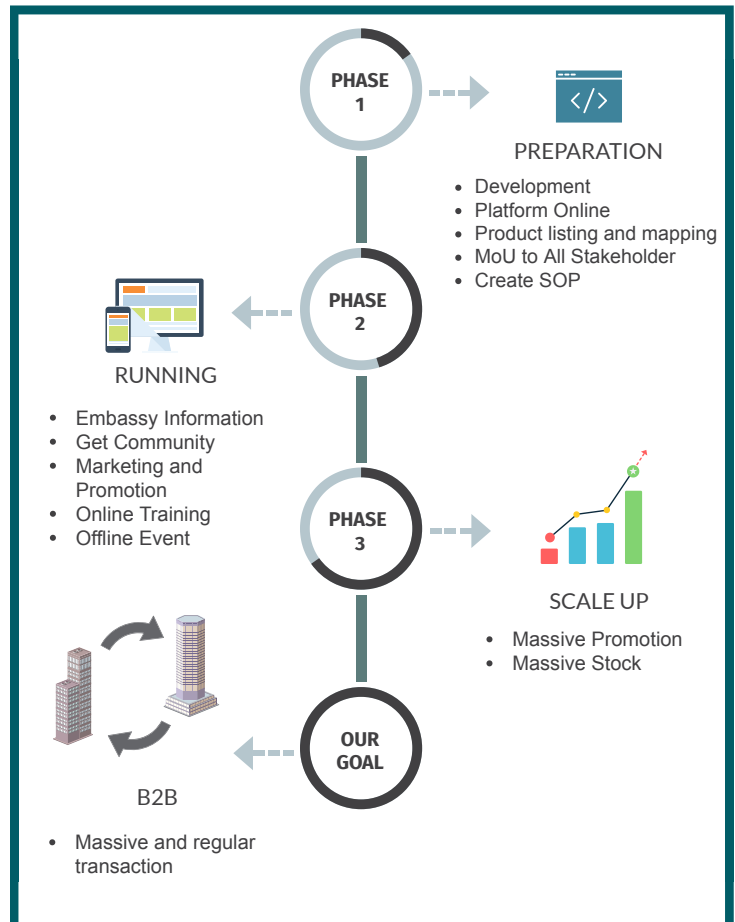
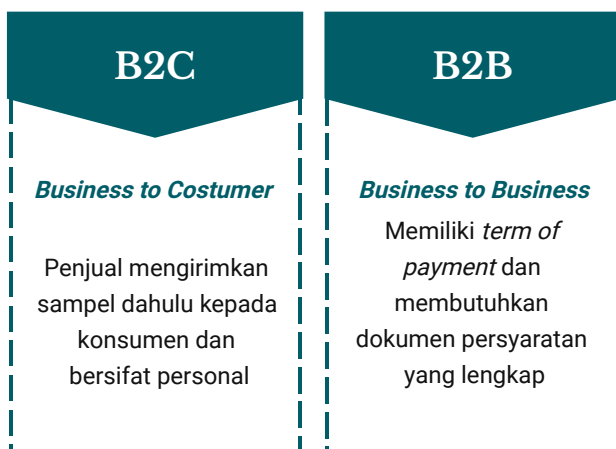
# PENGEMBANGAN PLATFORM *E-COMMERCE* UNTUK FASILITASI EKSPOR PRODUK PERTANIAN

Berbagai upaya dilakukan Kementerian Pertanian di tengah keterbatasan akses di masa pandemi COVID-19 guna meningkatkan produksi pangan dan memenuhi kebutuhan pangan nasional, serta tetap mendorong fasilitasi ekspor komoditas pertanian Indonesia ke negara tujuan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Biro Kerja Sama Luar Negeri dalam mendukung akselerasi peningkatan ekspor komoditas pertanian unggulan Indonesia ke sejumlah pasar negara mitra prioritas adalah membangun sebuah *platform e-commerce*. Saat ini *draft platform e-commerce* sedang dalam tahap pembahasan bersama perwakilan unit-unit teknis terkait lingkup Kementan.

*Platform e-commerce* diharapkan nantinya tidak sekedar menjadi “*marketplace*”, namun juga dapat memberikan fasilitasi secara optimal bagi para eksportir dan pengusaha pertanian, serta petani produsen di dalam negeri melewati seluruh tahapan proses untuk dapat memasuki pasar ekspor di berbagai negara secara berkesinambungan.

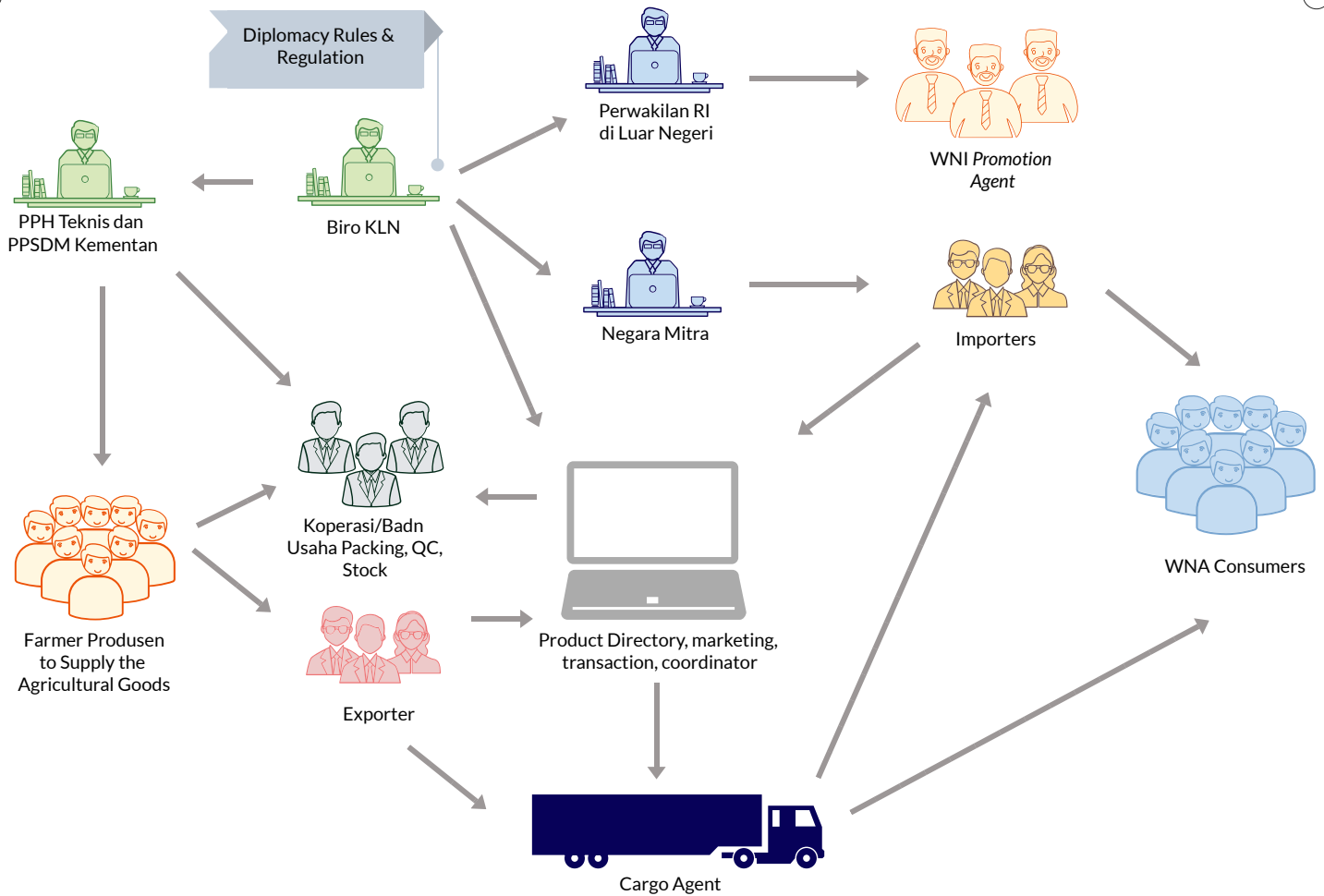
Platform akan memiliki 2 (dua) model, yaitu:



Fasilitasi pertama ditujukan bagi setiap eksportir dan pengusaha pertanian, serta petani produsen untuk memperkenalkan seluruh produk pertanian yang dimiliki ke pasar ekspor. Hal ini dilakukan dengan cara meng-*upload profile* dari masing-masing produk yang akan dipasarkan (karakteristik spesifik produk, potensi produksi, perkiraan waktu panen, serta harga) ke dalam *platform e-commerce* dalam bentuk infografis, video, dan format lainnya.

Fasilitasi kedua adalah promosi yang ditujukan bagi para importir potensial (*buyers*) di berbagai negara menggunakan jalur diplomatik, baik melalui perwakilan RI maupun langsung ke negara mitra pada kesempatan pertemuan-pertemuan bilateral, regional, dan multilateral.

Stakeholder & General Flow



Stakeholders dan general flow platform yang akan dikembangkan

Fasilitasi ketiga adalah pengurusan berbagai dokumen perijinan ekspor, baik dari sisi perijinan di dalam negeri, maupun perijinan yang terkait dengan kebijakan spesifik di masing-masing negara tujuan ekspor, termasuk persyaratan kualitas dan keamanan pangan (*food safety*) serta aspek perkarantinaan lainnya.

Fasilitasi keempat adalah logistik pengiriman produk ke berbagai negara tujuan ekspor, melalui penyusunan perjanjian kerja sama dengan berbagai perusahaan logistik transportasi, seperti PT. Garuda Indonesia, PT. PELNI, serta perusahaan logistik dan transportasi lainnya.

Fasilitasi berikutnya adalah keamanan transaksi yang menjamin keamanan serta kenyamanan, baik bagi para pengusaha ekportir Indonesia maupun bagi para mitra importir di berbagai negara, melalui perjanjian kerja sama dengan berbagai otoritas finansial.

Terakhir adalah fasilitasi pembinaan, tidak hanya bagi para ekportir dan pengusaha pertanian yang sudah mapan, tetapi juga mendorong peran para milenial untuk dapat menjadi eksportir melalui *platform* ini dengan mengambil peran sebagai *“aggregator”*, sehingga para petani produsen juga merasakan manfaat langsung dari keberadaan *platform* ini.

Memperhatikan peran fasilitasnya yang sangat luas, ke depan *platform e-commerce* ini perlu dikelola melalui suatu kerangka kelembagaan yang solid dan profesional.

Keterlibatan para milenial yang diwakili oleh Duta Petani Milenial (DPM) dalam pengelolaan *platform* ini diharapkan dapat mengoptimalkan dukungan fasilitasi-fasilitasi tersebut kepada petani produsen secara profesional, dengan pendampingan penuh dari Kementan.

## KEMENTAN Gandeng LAZADA dan ALIBABA Perluas Pasar Produk Pertanian

Sebagai salah satu upaya mengatasi terkendalanya jalur distribusi pemasaran produk pertanian sebagai dampak merebaknya pandemi COVID-19 di dunia saat ini, Kementerian Pertanian sepakat bekerja sama dengan Lazada.co.id dalam rangka memfasilitasi pemasaran produk dalam negeri dan Alibaba.com untuk pasar global.

Dalam kerja sama kemitraan tersebut, Lazada bekerja sama dengan 59 Duta Petani Milenial dan 8 Petani Andalan yang merupakan hasil program Kostra Tani di seluruh Indonesia untuk menjadi *seller* aktif pada *platform* Lazada. Selain itu, UMKM produk pertanian serta mitra petani yang berasal dari 4 sub sektor yang merupakan binaan Kementan juga terlibat dalam kemitraan tersebut.

Sehingga total petani dan UMKM yang akan terlibat di *platform* Lazada adalah sebanyak 141 pihak.

Salah satu kelebihan yang dimiliki Lazada adalah tingkat kunjungan konsumen yang tinggi sehingga memiliki potensi keberhasilan perdagangan produk pertanian dari mitra *seller* Lazada. Produk pertanian yang berasal dari produsen dapat memanfaatkan fasilitas instan kurir untuk produk segar dan Lazada Express untuk pengiriman produk pertanian dengan umur simpan yang tinggi.

Model kemitraan dengan Lazada nantinya tidak hanya sekedar berupa *marketplace* yang memberikan kemudahan bagi konsumen dan *stakeholders* yang bermitra untuk bertransaksi. Tetapi juga, Lazada selama ini memiliki program *training* dan *capacity building* di **Lazada University** bagi peningkatan usaha bersama yang secara aktif ditujukan kepada mitra Lazada termasuk bekerja sama dengan beberapa Perguruan Tinggi.

Pada prinsipnya semua Duta Petani Milenial, petani binaan dan UMKM yang bergabung dengan Lazada akan dapat mengikuti program pelatihan. Program pelatihan dan inkubasi akan dilakukan selama 90 hari melalui pemberian materi pelatihan terkait kemampuan manajerial maupun pemanfaatan *tools* untuk mengembangkan usaha dari mitra *seller* yang terlibat.

Saat ini payung hukum dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Kementan dengan pihak Lazada sedang dalam tahap finalisasi yang mencakup beberapa aspek diantaranya dalam hal:

- pengembangan dan peningkatan kapasitas dengan cara saling bersinergi dalam menyelenggarakan program pelatihan bagi Petani Milenial;
- peningkatan kerja sama guna mendukung pengembangan usaha bagi Petani Milenial;
- penyediaan sistem elektronik atau aplikasi lazada.co.id dalam layanan penyediaan produk pangan dan jasa belanja.

C

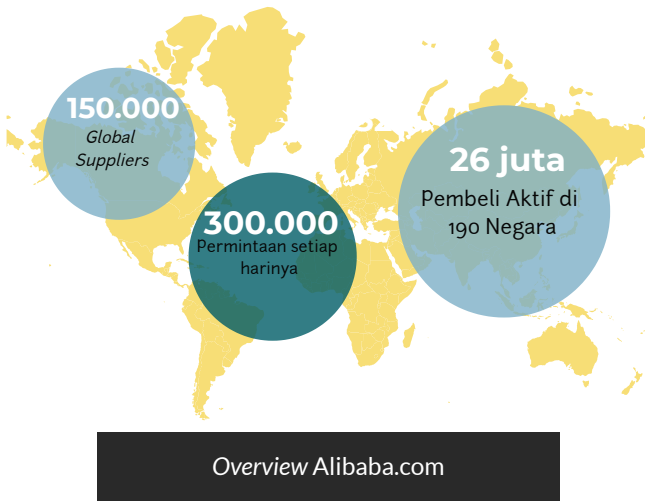
### Cross-border eCommerce Platforms

Tmall Global	AliExpress	Lazada
<p>Website: <a href="http://tmall.com">tmall.com</a>                      Chinese name: 天猫 (tiān māo / sky cat)                      Launched: 2008                      Type: b2c                      Markets served: Mainland China and Hong Kong                      Languages: Chinese only</p>	<p>Website: <a href="http://aliexpress.com">aliexpress.com</a>                      Launched: 2010                      Type: b2c (also c2c)                      Markets served: global                      Other available languages: Russian, Portuguese, Spanish, French, German, Italian, Dutch, Turkish, Japanese, Korean, Thai, Vietnamese, Arabic, Hebrew and Polish</p>	<p>Website: <a href="http://lazada.com">lazada.com</a>                      Launched: 2012                      Type: b2c                      Markets served &amp; languages: Indonesia / Indonesian, Malaysia / English &amp; Malay, Philippines / English, Singapore / English, Thailand / Thai &amp; English, Vietnam / Vietnamese &amp; English</p>
<p>Website: <a href="http://alibaba.com">alibaba.com</a>                      Launched: 1999                      Type: b2b                      Markets served: global                      Other available languages: Spanish, Portuguese, German, French, Italian, Hindi, Russian, Korean, Japanese, Arabic, Thai, Turkish, Dutch, Vietnamese, Indonesian and Hebrew</p>		

Sumber: Alibaba, disampaikan pada rapat virtual tgl 24/06/20

Melalui Nota Kesepahaman tersebut, Kementan mengharapkan agar kemitraan dengan Lazada tidak hanya terbatas pada aspek pemasaran saja, tetapi juga berkomitmen dalam melakukan kegiatan *capacity building* dalam bentuk pelatihan, *training*, *mentoring*, serta berupaya untuk menjadi wadah inkubasi bisnis bagi petani di Indonesia secara lebih luas.

Peluang Pemasaran Produk Pertanian di Pasar Global



Selain dengan Lazada, Kementan juga bekerja sama dengan Alibaba.com untuk memfasilitasi produk pertanian Indonesia di pasar global. Saat ini, bisnis e-commerce berskala global memiliki potensi keuntungan yang sangat besar dimana berdasarkan data dari US International Trade Commission, nilai keuntungan yang dihasilkan dalam skema Business to Business (B to B) dapat mencapai USD 23,9 trilyun atau 6 kali lebih besar dari skema Business to Consumer (B to C) yang hanya USD 3,8 trilyun.



Secara teknis, Alibaba.com bekerja sama dengan PT. Anugerah Tangkas Transportindo (PT. ATT) yang merupakan channel partner yang bermitra dengan Alibaba.com sejak 2018 yang memiliki fungsi membantu mengkoneksikan qualified supplier - qualified buyer sehingga dapat mempercepat proses transaksi sekaligus dapat memperkecil hambatan dalam proses pembayaran.

35 ribu produk dari supplier Indonesia



PT. ATT juga berperan sebagai export hub yang akan memfasilitasi supplier dalam penyediaan warehouse, membantu supplier mendapatkan export licence, custom clearance, logistik dan memberikan asuransi perdagangan bekerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Beberapa produk yang sudah rutin diekspor melalui platform alibaba.com dengan ATT logistik diantaranya salak, manggis, rambutan, jambu biji, mangga, ubi cilembu, petani, buncis, kubis maupun kembang kol, sarang burung walet, ikan hidup, bunga potong, biji kopi. Produk-produk tersebut diekspor dengan menggunakan pesawat kargo dan jalur laut menggunakan reefer container dengan tujuan USA, Singapura, Kuala Lumpur, Hongkong, Guangzhou, Beijing, Shanghai, Fuzhou, Xiamen, Dubai, Kuwait, Jeddah, Perancis dan Amsterdam.

Saat ini, Kementan sedang mengidentifikasi pelaku usaha ekspor maupun UMKM yang sudah siap dari segi administrasi maupun kapasitas dalam menyediakan produk ekspor berkualitas untuk bekerja sama dengan Alibaba.com dan PT. ATT. Bersama Alibaba.com, Kementan akan mengelaborasi lebih lanjut terkait pola kerja sama yang tepat. Sebagai tahap awal, kerja sama akan dilakukan dalam bentuk pelatihan maupun capacity building bagi pelaku usaha/UMKM produk pertanian berkaitan dengan pemanfaatan platform e-commerce untuk ekspor.

## BRIEF UPDATE PENGUATAN AKSES PASAR KE NEGARA-NEGARA MITRA

### (AUSTRALIA, CHILE, COLOMBIA, INDIA, JEPANG, TAIWAN, TIONGKOK, MOZAMBIK)

Kementerian Pertanian c.q. Biro Kerja Sama Luar Negeri terus berupaya memfasilitasi penguatan akses pasar komoditas pertanian Indonesia di negara-negara mitra. Meskipun situasi pandemi membatasi beberapa kegiatan dan forum pertemuan dengan negara-negara mitra, Biro KLN senantiasa melakukan koordinasi untuk penguatan akses pasar ke negara-negara mitra yang dilakukan melalui pertemuan daring dengan para pihak terkait di negara mitra.

#### AUSTRALIA



Melalui pertemuan *Preliminary Meeting on Indonesia-Australia Working Group on Agriculture, Food and Forestry Cooperation* yang dilaksanakan secara daring pada 11 Juni 2020, Biro KLN memfasilitasi penguatan akses pasar beberapa komoditas pertanian Indonesia ke Australia. Komoditas yang sangat didorong akses pasarnya ialah buah tropis, seperti: (1) nanas; (2) manggis; (3) salak; dan (4) buah naga.

#### KINERJA EKSPOR BUAH TROPIS INDONESIA KE DUNIA TAHUN 2019

27 juta ton  
**MANGGIS**

1,6 juta ton  
**SALAK**

236 juta ton  
**NANAS**

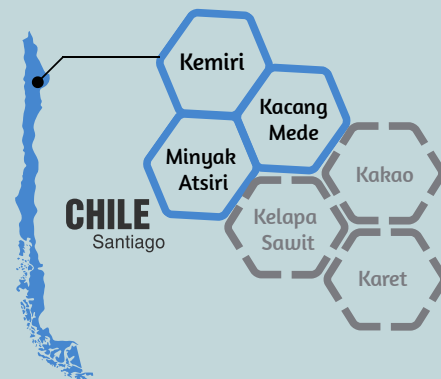
98 ribu ton  
**BUAH NAGA**

Guna menambahkan nilai ekspor komoditas hortikultura Indonesia, Kementan berupaya untuk mendorong akses pasar buah-buahan tropis kepada Pemerintah Australia. Upaya ini dinilai membantu meningkatkan kinerja perdagangan komoditas pertanian Indonesia ke Australia yang mengalami defisit sebesar USD 669 juta pada tahun 2019. Selain komoditas hortikultura, Indonesia juga mulai mendorong akses pasar daging ayam ke Australia. Di tahun 2019, Indonesia memproduksi 3,83 juta ton daging ayam. Setelah memenuhi kebutuhan nasional, Kementan saat ini mendorong surplus daging ayam diekspor ke negara-negara mitra, termasuk Australia. Ekspor ini akan turut menambah nilai total ekspor daging ayam ke dunia yang mencapai USD 1,6 juta atau sebanyak 722 ribu ton.

#### CHILE



Guna menyeimbangkan defisit neraca perdagangan komoditas pertanian Indonesia-Chile sebesar US\$ 28 juta, Kementan mengupayakan permohonan akses pasar komoditas hortikultura dan perkebunan Indonesia ke Chile.



Pada tahun 2019, komoditas perkebunan yang sudah diekspor ke Chile hanya: (1) kemiri; (2) minyak atsiri; dan (3) kacang mede.

Melalui pertemuan koordinasi dengan Chile, Kementan mengupayakan akses pasar untuk komoditas perkebunan unggulan Indonesia, seperti kelapa sawit, karet, dan kakao. Ekspor komoditas hortikultura ke Chile juga perlu ditingkatkan karena jumlahnya yang terbilang masih minim. Kementan mendorong akses pasar buah-buahan tropis, khususnya nanas dan pisang ke Chile. Pada tahun 2019, ekspor nanas dan pisang hanya senilai USD 405 ribu dan USD 36, jumlah yang masih dapat ditingkatkan dalam rangka menyeimbangkan neraca perdagangan kedua negara.

## COLOMBIA

Biro KLN juga telah memfasilitasi pertemuan koordinasi dengan pihak Colombia. Salah satu agenda yang dibahas yaitu akses pasar komoditas hortikultura dan perkebunan Indonesia ke Colombia. Langkah ini merupakan upaya meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia-Colombia yang mengalami surplus USD 7,8 juta pada Indonesia.

### KINERJA EKSPOR INDONESIA KE COLOMBIA TAHUN 2019

9,8	376	44
JUTA USD	RIBU USD	RIBU USD
KARET	TEH	NANAS

Kementan mendorong pembukaan akses pasar untuk komoditas: (1) karet; (2) kelapa sawit; (3) kakao; (4) nanas; dan (5) pisang, guna meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke Colombia yang masih berada pada angka USD 11 juta di tahun 2019. Dalam hal ini, pihak Colombia telah memberikan akses pasar untuk komoditas pertanian tersebut. Sebagai langkah tindak lanjut, Kementan akan mengajukan proses *Pest Risk Analysis* (PRA) kepada pihak Colombia untuk komoditas buah tropis.

## INDIA

Biro KLN telah berpartisipasi dalam pertemuan **the 3rd Biennial Trade Ministers Forum** (BTMF) Indonesia-India pada tanggal 29 Juni 2020. Pada forum tersebut, Indonesia menyampaikan *concern* terkait akses pasar beberapa komoditas pertanian, yaitu: (1) pinang dan (2) *Refined Palm Oil* (RPO).

Indonesia mengalami surplus pada neraca perdagangan komoditas pertanian sebesar USD 2,4 milyar. Namun demikian, kinerja ekspor pinang ke India hanya mencapai USD 26 juta, belum meningkat selama lima tahun terakhir. Hal ini dikarenakan bea masuk pinang ke India yang tinggi, mencapai 100% dan tidak dibukanya akses pasar oleh India dalam perundingan dagang.

Indonesia mengharapkan agar India memberikan akses pasar yang lebih baik melalui beberapa perundingan perdagangan, seperti *ASEAN-India TIGA* dan forum bilateral PTA yang rencananya akan segera diinisiasi.

Pemerintah India melakukan perubahan peraturan terkait kategori importasi RPO dari "free" menjadi "restricted". Dengan demikian, untuk melakukan importasi RPO ke India, importir harus memperoleh *import license* untuk produk RPO.

### TIGA KOMODITAS EKSPOR UTAMA INDONESIA KE INDIA

2,3	285	81
MILIAR USD	JUTA USD	JUTA USD
KELAPA SAWIT	KARET	KAKAO

Hal ini diprediksi akan menjadi hambatan perdagangan untuk ekspor Indonesia ke India dan mengurangi nilai ekspor kelapa sawit yang merupakan komoditas terbesar penyumbang nilai perdagangan komoditas pertanian kedua negara, yang mencapai USD 2,1 milyar pada tahun 2019. Oleh karena itu, Kementan akan kembali mengangkat isu akses pasar pada pertemuan BTMF agar menjadi perhatian Pemerintah India. Tiga komoditas ekspor utama Indonesia ke India diketahui adalah kelapa sawit (USD 2,3 miliar), karet (USD 285 juta), dan kakao (USD 81 juta)

## TAIWAN

Meskipun Indonesia mengalami surplus sebesar USD 80 juta pada neraca perdagangan komoditas pertanian Indonesia-Taiwan, Indonesia terus mendorong akses pasar hortikultura ke Taiwan. Hal ini mengingat neraca perdagangan subsektor hortikultura yang masih tergolong rendah dan dapat ditingkatkan, yaitu sebesar USD 3,3 juta.

### KINERJA EKSPOR PRODUK HORTIKULTURA INDONESIA - TAIWAN TAHUN 2019

5,9	1,2	719
JUTA USD	RIBU USD	RIBU USD
KUBIS	CABAI	NANAS

Kementan terus melakukan negosiasi permintaan akses pasar komoditas hortikultura, terutama buah manggis ke Taiwan. Pada tahun 2019, Indonesia memproduksi 32 ribu ton manggis dan telah mengekspor ke lebih dari 30 negara.

**TIONGKOK**



Kementan juga mendorong akses pasar ke salah satu pasar terbesar di dunia, yaitu Tiongkok, dengan surplus neraca perdagangan komoditas pertanian senilai USD 1,8 milyar pada tahun 2019. Tindak lanjut dari penandatanganan protokol ekspor buah naga antara RI - RRT pada tahun 2019 adalah akan direalisasikannya ekspor perdana buah naga Indonesia ke RRT pada saat panen raya buah naga bulan Oktober/November 2020.

Ekspor buah naga Indonesia pada tahun 2019 diketahui mencapai 98 ribu ton (senilai USD 210 ribu) dan berpotensi untuk terus meningkat dengan dilakukannya ekspor ke RRT.

Komoditas ekspor utama Indonesia ke Tiongkok adalah kelapa sawit (USD 3,1 milyar), karet (USD 310 juta), kelapa (USD 138 juta). Sedangkan komoditas impor utama dari Tiongkok ialah bawang putih (USD 544 juta), apel (259 juta), pir (213 juta).

**Ekspor Buah Naga ke Dunia**



**Ekspor Nanas dalam bentuk olahan ke Tiongkok**



Selain buah naga, buah nanas segar juga menjadi prioritas Indonesia untuk dipasarkan di Tiongkok. Hingga saat ini, Kementan terus mengupayakan pembukaan akses pasar buah nanas segar di Tiongkok dengan memenuhi beberapa persyaratan Pemerintah Tiongkok, seperti *Pest Risk Analysis* terhadap hama pada buah nanas segar.

Untuk komoditas nanas, hanya nanas dalam bentuk olahan yang telah berhasil menembus pasar Tiongkok senilai USD 10 juta pada tahun 2019. Dengan dibukanya akses pasar buah nanas segar akan berkontribusi pada nilai ekspor komoditas nanas Indonesia.

**JEPANG**



Jepang merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia dengan surplus neraca perdagangan komoditas pertanian senilai USD 1 milyar. Kementan terus mendorong akses pasar komoditas pertanian, khususnya komoditas hortikultura, yaitu buah mangga segar, untuk dapat segera dipasarkan di Jepang.

Produksi mangga dalam empat tahun terakhir mengalami peningkatan, namun proporsi produksi mangga terhadap jumlah mangga segar yang diekspor sangat kecil, yaitu 0,03-0,04%. Upaya akselerasi ekspor diharapkan akan meningkatkan nilai ekspor hortikultura Indonesia ke Jepang yang pada tahun 2019 senilai USD 40 juta, serta menambahkan variasi produk ekspor hortikultura ke Jepang yang saat ini didominasi oleh nanas, polong-polongan, dan pisang.



**MOZAMBIK**



Kementan turut serta berperan dalam perundingan Indonesia-Mozambique *Preferential Trade Agreement* (IM-PTA) yang merupakan kerja sama perdagangan pertama yang dimiliki Indonesia di benua Afrika untuk penguatan akses pasar produk pertanian ke Mozambik dan negara-negara Afrika lainnya. Neraca perdagangan pertanian Indonesia-Mozambik mengalami surplus sebesar USD 56 juta. IM-PTA memberikan peluang peningkatan akses pasar produk Indonesia melalui penurunan tarif sebanyak 217 pos tarif, beberapa komoditas pertanian di antaranya minyak sawit beserta turunannya dan karet. Kesepakatan ini telah berdampak positif terhadap ekspor kelapa sawit yang pada tahun 2019 mencapai **USD 71 juta** (98% dari ekspor pertanian dan 71,45% dari total ekspor Indonesia ke Mozambik) dan karet Indonesia (USD 162 ribu).

## FORUM KOORDINASI DENGAN ATASE PERTANIAN TOKYO, BRUSSEL, ROMA, DAN WASHINGTON DC DALAM RANGKA Mendukung Peningkatan Ekspor Komoditas Pertanian

Forum Koordinasi dengan Atase Pertanian telah dilakukan pada bulan Juni 2020 dengan Atase Pertanian Tokyo, Washington DC, Roma, serta Atase Pertanian Brussel, serta mengundang Unit Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Forum ini dilakukan dalam upaya bertukar informasi terkait akses pasar, peluang kerja sama serta mengidentifikasi permasalahan yang ditangani perwakilan RI di Luar Negeri khususnya Atase Pertanian, serta mendapatkan masukan dari Unit Eselon I terkait lingkup Kementan. Berikut rangkuman beberapa isu *pending matters* pada masing-masing perwakilan:



### ATASE PERTANIAN BRUSSEL

- Ekspor tepung yang berasal dari olahan umbi-umbian yang bersifat *gluten free* dan termasuk dalam kelompok *novel food*;
- Penanganan ekspor buah tropis dan tanaman obat organik;
- Kebijakan terkait *Maximum Residu Limits (MRLs)*;
- Registrasi produk *Steamed Hoof and Hom* serta *Black Soldiers Flies (BSF)* pada portal TRACES EU;
- Pembentukan *Sustainable Spices Indonesia (SSI)*; (f).Akses ekspor kenari dan kopi di EU.



### ATASE PERTANIAN TOKYO

- Kerjasama *Taiwa's Small Rice Machine* dengan Pemerintah Kabupaten Tabanan, Bali;
- Identifikasi potensi ekspor beras ke Jepang;
- Investasi dan ekspor Horti (mangga, pisang, nenas, cabe, bawang merah, lengkuas, kunyit, kencur, pete, jengkol, sereh, racikan bumbu, bunga krisan);
- Dokumen bebas AI untuk daging ayam segar *frozen*;
- Tindak lanjut *lifting import ban* olahan daging sapi;
- Terkait rencana ekspor tepung bulu ayam dan tepung telur.



### ATASE PERTANIAN ROMA

- Fasilitasi akses pasar buah tropis dan sayuran organik; rempah, kopi dan teh;
- Fasilitasi kerja sama multilateral: nutrisi dan diet sehat, *International Year of Fruit and Vegetable 2021*;
- Kerja sama investasi dan *capacity building* mozzarella;
- GIAHS;
- Bantuan teknis proyek kerja sama FAO dan GEF; Selatan-Selatan; serta advokasi kebijakan.



### ATASE PERTANIAN WASHINGTON DC

- Upaya menjadikan Barantan sebagai Pusat Pelatihan SPS se Asia Tenggara melalui peran STDF dan WTO;
- Pengenaan import alert berupa pengenaan status DWPE dalam *red list* FDA. Kasus *list importer* Indonesia masih tertera pada *red list website* FDA.

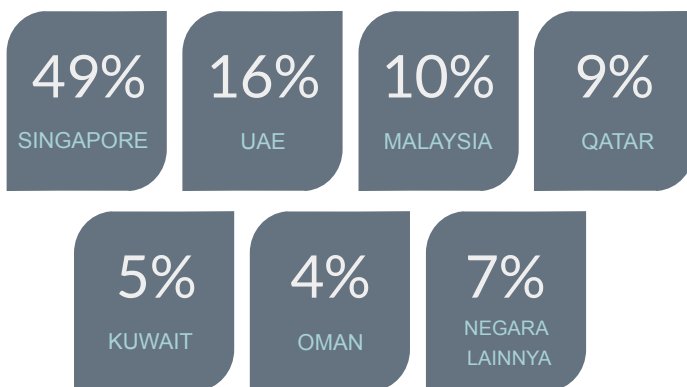
## UPAYA KEMENTERIAN PERTANIAN MENEMBUS PASAR MANGGA DI JEPANG

**Indonesia** merupakan produsen buah mangga dunia kelima terbesar setelah India, Tiongkok, Thailand, dan Meksiko.



Produksi buah mangga dalam empat tahun terakhir (2016-2019) mengalami peningkatan dari 1,8 juta ton pada tahun 2016 menjadi 2,8 juta ton pada tahun 2019. Namun demikian, jumlah mangga yang diekspor masih sangat kecil, dengan proporsi volume ekspor hanya mencapai 0,03-0,04%.

### Negara Tujuan Ekspor Mangga Segar Tahun 2019



Beberapa kendala dalam melakukan ekspor buah mangga utamanya terkait:

- Belum terpenuhinya persyaratan teknis/protokol ekspor dari negara tujuan ekspor;
- Harga buah mangga Indonesia yang cukup mahal dibandingkan dengan mangga dari India dan Pakistan.

Mempertimbangkan potensi pasar negara-negara tujuan ekspor yang masih terbatas, Kementerian Pertanian, termasuk melalui Atase Pertanian pada KBRI Tokyo, berupaya mendorong akses pasar buah mangga segar ke berbagai negara, termasuk Jepang. Jepang merupakan pasar yang cukup potensial sebagai tujuan ekspor buah mangga Indonesia.



Beberapa analisa pasar meyakini bahwa varian mangga asli Indonesia, seperti **grafita merah** dan **gedong gincu**, dapat bersaing di pasar Jepang

Namun, untuk dapat mengekspor buah mangga segar ke Jepang, Indonesia harus memberikan permohonan akses pasar dengan mengajukan *import ban lifting* dengan beberapa persyaratan kepada pihak Jepang. Hingga saat ini, Indonesia masih dalam tahap persiapan fasilitas *Vapour Heat Treatment* untuk mangga segar dan negosiasi pembuatan protokol ekspor. Kementerian Pertanian, termasuk Biro Kerja Sama Luar Negeri, Atase Pertanian RI di Tokyo, Badan Karantina Pertanian, dan Direktorat Jenderal Hortikultura, terus melakukan sinergi kerja sama dalam proses pengajuan *import ban lifting* ini.

Jepang mempersyaratkan agar buah mangga segar Indonesia yang akan diekspor ke Jepang diberikan perlakuan mitigasi lalat buah dengan menggunakan *Vapour Heat Treatment*. Dalam hal ini, Indonesia telah mengupayakan pencarian investor alat *Vapour Heat Treatment* melalui penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Saat ini, terdapat dua investor dalam negeri dan satu investor Jepang yang menyatakan minatnya untuk berinvestasi pada alat *Vapour Heat Treatment* tersebut. Proses penyusunan protokol ekspor membutuhkan persyaratan teknis yang cukup komprehensif, diantaranya perlakuan untuk memitigasi enam jenis lalat buah yang ada pada mangga.

Dalam perkembangan negosiasi terakhir, masih tersisa satu spesies lalat buah, *Bactrocera occipitalis*, yang diminta pihak Jepang untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Namun demikian, berdasarkan pemantauan Badan Karantina Pertanian, jenis lalat buah tersebut hanya ditemukan dalam populasi yang sangat kecil di pulau Kalimantan, sedangkan sentra produksi buah mangga segar berada pada pulau Jawa. Terkait hal ini, Badan Karantina Pertanian, telah melakukan korespondensi untuk meyakinkan pihak Jepang bahwa jenis lalat buah yang dikhawatirkan oleh pihak Jepang tidak ditemukan pada buah mangga segar yang akan diekspor ke Jepang.



Isu lalat buah merupakan isu utama dalam ekspor buah tropis Indonesia ke berbagai negara maju yang memiliki aturan perkarantinaan yang ketat, seperti Jepang, Australia, dan Selandia Baru.



Selain bersinergi secara internal, Kementerian Pertanian juga melibatkan berbagai pihak untuk memberikan masukan dalam membantu merealisasikan program ekspor buah mangga segar ke Jepang. Salah satunya yaitu Indonesia-Japan *Business Network*, telah berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait serta merumuskan rencana aksi yang menitikberatkan pada sinergi antar *stakeholder* untuk keberhasilan realisasi ekspor ini.

Untuk itu, Kementerian Pertanian terus melakukan penguatan program nasional pengendalian lalat buah secara berkelanjutan di seluruh daerah sentra produksi buah unggulan ekspor Indonesia serta melakukan publikasi ilmiah tingkat nasional dan internasional atas program tersebut.

Tindak lanjut jangka pendek yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian adalah proses negosiasi permohonan akses pasar, finalisasi protokol ekspor, serta pembinaan teknis dan pendampingan petani dalam produksi on farm dan off farm agar kualitas buah mangga dapat memenuhi kualitas ekspor. Dalam jangka panjang, Indonesia akan terus meningkatkan koordinasi dalam upaya mengembangkan ekspor buah mangga dan buah tropis lainnya ke Jepang dan pasar global.

## KAJIAN *PUBLIC STOCKHOLDING* (PSH) FOR FOOD SECURITY PURPOSES

Isu-isu perundingan sektor pertanian di WTO selalu berkembang dan membutuhkan kesepakatan bersama semua anggota WTO (*single undertaking - nothing is agreed until everyone agrees*), termasuk diantaranya isu *Public Stockholding (PSH) for Food Security Purposes*. Sejak Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 di Bali 2013 yang mengamanatkan agar proposal PSH mendapatkan *permanent solution*, hingga kini, isu PSH masih menjadi tarik ulur antara negara berkembang dan negara maju.

Menurut *Agreement on Agriculture* WTO, PSH masuk dalam kategori *Green Box*, yaitu program layanan pemerintah termasuk program pengelolaan stok pangan untuk tujuan ketahanan pangan dan bantuan pangan domestik yang pelaksanaannya tidak mendistorsi pasar.

Salah satu syarat PSH adalah pembelian bahan pangan oleh pemerintah harus dilakukan dengan harga pasar saat ini dan penjualan dari PSH harus dilakukan dengan harga tidak lebih rendah dari harga domestik. Sehingga, jika terdapat perbedaan antara harga pengadaan dan harga referensi (didasarkan pada harga 1986 - 1988), maka perbedaan harga tersebut diperlakukan sebagai subsidi kepada petani. Sedangkan harga komoditas pertanian, terutama pangan pokok, telah meningkat berlipat ganda dari harga referensi tersebut.

Hal ini menyebabkan perbedaan harga yang cukup besar -yang dikategorikan sebagai subsidi tersebut- akan dihitung menjadi *Aggregate Measure of Support (AMS)* yang jelas akan membuat subsidi melebihi tingkat maksimum AMS atau *de minimis* yang dimiliki oleh negara berkembang. Ketentuan ini telah membatasi kemampuan negara berkembang untuk menerapkan skema untuk membantu petani.

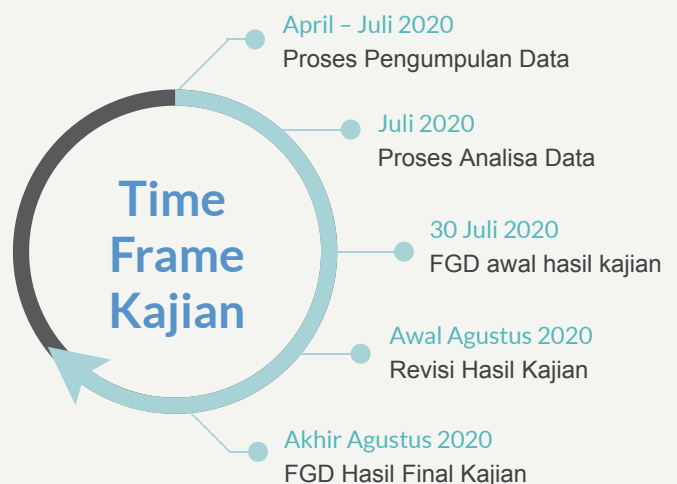
Hingga saat ini, negosiasi terus berlangsung terkait beberapa proposal PSH yang telah di-table dalam *Committee of Agriculture*.

Proposal PSH:

- *JOB/AG/118 proposed by The Russian Federation and Paraguay*
- *JOB/AG/125 proposed by Norway and Singapore*
- *JOB/AG/99 proposed by Brazil, European Union, Colombia and Uruguay*
- *JOB/AG/105 proposed by The G33*

Posisi Indonesia saat ini sebagai *Chair/Pemimpin* Kelompok G-33 mewakili negara-negara berkembang sangat strategis, sehingga diperlukan kesiapan dan kematangan dalam menyiapkan posisi yang jelas terhadap usulan proposal PSH.

Dalam rangka menyiapkan posisi Indonesia terkait isu PSH, Biro Kerja Sama Luar Negeri bekerja sama dengan Tim *International Trade Analysis and Policy Studies (ITAPS)* - IPB saat ini sedang melaksanakan Kajian *Public Stockholding (PSH)*. Kajian bertujuan untuk menganalisa *product coverage* dari *staple food* (pangan pokok) yang dapat diusulkan (*flying*) sebagai posisi proposal PSH Indonesia selain beras (jagung dan kedelai).



Diharapkan melalui kajian ini dapat memantapkan posisi Indonesia terkait PSH sehingga nantinya dapat dicapai *meaningful and implementable decision* yang dapat diterima oleh sebagian besar anggota WTO.

## BRIEF UPDATE PENGUATAN KERJA SAMA TEKNIS DAN INVESTASI DENGAN NEGARA-NEGARA MITRA

Biro Kerja Sama Luar Negeri telah memfasilitasi beberapa kerja sama teknis dan investasi antara Direktorat Jenderal teknis lingkup Kementerian Pertanian dengan negara-negara mitra.

### KOREA SELATAN

Kementerian Pertanian dan Korea Rural Economic Institute (KREI) menyepakati kerja sama proyek **“Development of Modern Agriculture in Way Kanan Regency, Lampung Province”**. Kerja sama dengan total dana hibah dari Korea Selatan senilai USD 350 ribu ini akan berfokus pada pengembangan pertanian modern di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung. Kegiatan kerja sama diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan serta rencana aksi untuk mendukung modernisasi pertanian inovatif sehingga dapat dijadikan model *scaling-up* bagi daerah-daerah lain di Indonesia. Selain itu, para petugas dan peneliti akan diberikan peningkatan kapasitas untuk mendukung modernisasi pertanian. Melalui empat kegiatan utama, yaitu *joint research*, *field study*, *invitational training*, dan *workshop*, diharapkan dapat memberikan *insight* bagi Indonesia dalam membangun pertanian yang lebih modern.

dengan judul **“Establishing Real-Time ASEAN Food Security Information System and Developing Human Resource in Indonesia (2nd phase)”**. Kerja sama yang didanai oleh hibah dari Korea Selatan ini bertujuan untuk membuat sistem informasi produksi tebu serta meningkatkan kapasitas petugas yang berperan dalam data dan informasi pertanian. Kegiatan ini akan berfokus pada pengembangan aplikasi yang telah dibuat pada fase 1 menjadi berbasis *online* serta *pilot project* pengukuran luasan dan estimasi produktivitas tebu menggunakan spasial.

**350**  
RIBU USD

**Development of Modern Agriculture in Way Kanan Regency, Lampung Province**

**Establishing Real-Time ASEAN Food Security Information System and Developing Human Resource in Indonesia (2nd phase)**

**282**  
RIBU USD

Selain itu, kerja sama dengan Korea Selatan juga dilakukan dengan Korea Agency of Education, Promotion and Information Service in Food, Agriculture, Forestry and Fisheries (EPIS),

### DENMARK

Indonesia dan Denmark menyepakati kerja sama pengembangan industri persusuan organik (**organic dairy farming system**) melalui proyek **Strategic Sector Cooperation (SSC) in Agriculture and Food Safety Sector** dengan pendanaan yang berasal dari Denmark sebesar 8.5 juta DKK (+Rp 18 milyar). Kerja sama ini merupakan hasil kesepakatan pada *the 4th Joint Agriculture Working Group (JAWG) between Indonesia and Denmark* yang diselenggarakan pada 4-6 Desember 2019 di Denmark. Direncanakan dokumen perjanjian hibah SSC akan ditandatangani pada Juli 2020 antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dari pihak Indonesia, dan Kedubes Denmark di Jakarta. Proyek SSC diharapkan dapat menjadi *pilot project* skala nasional yang memberikan dampak signifikan pada pengembangan industri persusuan organik di Indonesia. Kerja sama ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi penting pada peningkatan ketersediaan sumber protein hewani di Indonesia, serta peningkatan pendapatan peternak.

## FIJI

Indonesia juga turut berperan dalam membantu negara-negara mitra, terutama di kawasan Pasifik dan Afrika. Fiji merupakan salah satu negara yang telah menerima bantuan dana hibah senilai Rp 5,8 milyar untuk pengadaan 100 unit traktor dengan ditandatanganinya *Grant Agreement* oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI dan *Permanent Secretary Ministry of Agriculture* Fiji pada tahun 2018.

Pemerintah Fiji telah melakukan pengadaan tahap pertama sebanyak 40 unit traktor tangan pada Februari 2020. Sisa dana akan digunakan untuk pengadaan traktor tangan tahap selanjutnya. Namun, situasi pandemi COVID-19 serta *Tropical Cyclone* yang melanda Fiji menyebabkan Pemerintah Fiji mempertimbangkan untuk menggunakan sisa dana hibah untuk pengadaan alat dan mesin pertanian *Mini Combine Harvesters* dan *Rice Rippers* untuk membangun ketersediaan pangan Fiji pasca bencana dan pandemi.

Guna mendukung ketahanan pangan Fiji di kala masa pandemi dan pasca bencana alam *Tropical Cyclone*, Biro Kerja Sama Luar Negeri telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal teknis serta Kementerian/Lembaga terkait untuk mempersiapkan proses amandemen teks perjanjian hibah serta perubahan peruntukan hibah. Diharapkan proses ini dapat berlangsung dalam waktu yang cepat agar dapat bermanfaat bagi Fiji di kala situasi pandemi ini.



Penyerahan traktor secara simbolis dilakukan oleh Dubes RI di Suva, Februari 2020



## INGGRIS

Indonesia dan Inggris menyepakati kerja sama "*Fleming Fund Partnership on Antimicrobial Resistance Surveillance in Indonesia*" dalam bentuk bantuan hibah kepada Indonesia senilai 8 juta Poundsterling (sekitar 49,8 milyar Rupiah). *Fleming Fund* merupakan program bantuan Inggris untuk membantu negara-negara berkembang untuk memerangi resistensi antimikroba.

Kerja sama ini bertujuan untuk penguatan *surveillance system* pengendalian resistensi antimikroba pada sektor kesehatan manusia dan hewan. Proyek akan dilaksanakan di Indonesia menggunakan pendekatan *One Health* yang melibatkan lintas sektoral seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Kesehatan. Fokus kerja sama yaitu *sharing knowledge and expertise* untuk pengembangan sektor kesehatan di Indonesia dengan area kerja sama yang lebih spesifik, yaitu *Health care services, Disease prevention and control, Health technology and medical devices, Human resources for health development, dan Health research and development.*

### *Fleming Fund Partnership on Antimicrobial Resistance Surveillance in Indonesia*



#### Area Kerja Sama

- *Health care services, Disease prevention and control*
- *Health technology and medical devices*
- *Human resources for health development,*
- *Health research and development.*



#### Tujuan

Membantu negara-negara berkembang untuk memerangi resistensi antimikroba



#### Nilai Bantuan

**IDR**  
**49,8 M**



#### Instansi yang Terlibat

- Kementerian Pertanian
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Kementerian Kesehatan

## BRIEF UPDATE PENGUATAN KERJA SAMA TEKNIS DAN INVESTASI DALAM KERANGKA MULTILATERAL

Biro Kerja Sama Luar Negeri memfasilitasi kerja sama teknis dan investasi antara Direktorat Jenderal teknis lingkup Kementerian Pertanian dengan organisasi internasional. Berikut *update* inisiasi kerja sama yang saat ini masih berlangsung dalam tahap pembahasan.

### FAO

# 1

*Joint collaboration UN Rome-Based Agencies (FAO, IFAD, WFP) (cq. KLN)*

- Bertujuan untuk mengembangkan *reference model* program pertanian terintegrasi dengan pendekatan *comparative advantage* masing-masing lembaga
- Update: RBAs akan menyampaikan *zero draft Joint Country Plan* pada bulan Juli 2020

# 2

Pengembangan *National Strategy on e-Agriculture* (cq. Pusdatin)

- Bertujuan untuk mendukung Kementan dalam pengembangan e-Agriculture, termasuk melalui *Agriculture War Room* dan digitalisasi pertanian
- Update: FAO akan menyampaikan *concept note* tindak lanjut atas rencana kerja sama yang rencananya dilakukan dalam bentuk *Technical Cooperation Programme (TCP)*

# 3

Proyek regional "*Livestock Emergency Preparedness and Response for Areas at High Risk of Volcanic Eruptions*" (OSRO/RAS/902/USA) (cq. PKH)

- Bertujuan untuk mengurangi dampak letusan gunung berapi di DIY dan Bali pada kesehatan dan produksi ternak melalui peningkatan kesiapsiagaan darurat yang lebih baik.
- Update: FAO telah menyampaikan *prodoc* untuk dittd Ditjen PKH dan selanjutnya registrasi hibah

# 4

Proyek multi-regional "*Governance Innovations for Sustainable Development of Food Systems*" (cq. BKP)

- Bertujuan untuk mendukung upaya meningkatkan sistem pangan khususnya kebijakan dan tata kelola sistem pangan.
- Update: FAO telah menyampaikan *prodoc*

# 5

Kerja sama penguatan pertanian keluarga (*family farming*) (cq. BKP)

- Bertujuan untuk mendukung upaya Pemri dalam berkontribusi pada Dekade PBB untuk Pertanian Keluarga, salah satunya melalui Program Pekarangan Pangan Lestari
- Update: FAO akan menyampaikan *concept note* usulan proyek TCP FF

# 6

Kerja sama penguatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) dalam kerangka FAO (cq. KLN)

- Bertujuan untuk penguatan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) di bidang pertanian, dengan negara-negara anggota FAO
- Update: KLN telah menyampaikan surat tanggapan atas MoU ke Kemlu untuk proses lebih lanjut

# 7

Proyek GEF-7 STAR "*Crop Diversity Conservation for Sustainable Use in Indonesia*" (cq. BB-Biogen, Balitbangtan)

- Bertujuan untuk memperkuat pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan untuk mendukung penguatan sektor pangan dan pertanian.
- Update: FAO bersama Balitbangtan akan mempersiapkan *full prodoc (Project Preparation Grant)*

## BRIEF UPDATE PENGUATAN KERJA SAMA TEKNIS DAN INVESTASI DALAM KERANGKA MULTILATERAL

Biro Kerja Sama Luar Negeri telah memfasilitasi kerja sama teknis dan investasi antara Direktorat Jenderal teknis lingkup Kementerian Pertanian dengan organisasi internasional.

### UNDP

# 1

#### Proyek GCF *"Building the climate resilience of smallholder farmers in Nusa Tenggara Timur"*

- Proyek bertujuan untuk memperkuat ketahanan rumah tangga petani kecil di NTT yang rentan menghadapi dampak ekstrim akibat perubahan iklim.
- Proyek akan difokuskan di 12 kabupaten di NTT dengan fokus komoditi: (1) kopi, (2) kakao, (3) mete, (4) kelapa, (5) jagung dan (6) padi.
- Total pembiayaan proyek hibah langsung dari GCF adalah USD 25 juta dengan target cofinancing Pemri sekitar USD 61 juta selama 6 tahun (2021-2026).
- *Executing agency* : Kemenko Perekonomian; dengan mitra K/L pelaksana: (1) Kementan; (2) BMKG; dan (3) Pemprov NTT.

#### Proyek GEF *"Strengthening Sustainability in Commodity and Food Systems, Land Restoration and Land Use Governance through Integrated Landscape Management for Multiple Benefits in Indonesia"* (FOLUR Impact Programme)

- Proyek bertujuan untuk memastikan keberlanjutan rantai nilai komoditas melalui penerapan pendekatan tata guna lahan yang komprehensif.
- Proyek akan difokuskan di 5 propinsi (Aceh, Sumut, Kalbar, Sulsel, Papua Barat) dengan fokus komoditi: (1) kopi, (2) kakao, (3) kelapa sawit, dan (4) padi.
- Total pembiayaan proyek hibah langsung dari GEF: USD 16.2 juta dengan target cofinancing Pemri sekitar USD 147.5 juta selama 6 tahun (2021-2026).
- *Executing agency* : Kemenko Perekonomian; dengan mitra K/L pelaksana: (i) Kementan; (ii) KLHK; (iii) Kementerian ATR/BPN; dan (iv) Pemda di 5 Kab. di 5 Provinsi

# 2

### WORLD BANK

# 1

#### Proyek *"Integrated Corporation of Agricultural Research, Development and Empowerment (I-Care)"*

- Proyek bertujuan untuk mengembangkan sistem penelitian dan pengembangan pertanian inovatif, integratif dan kolaboratif mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian (Model kawasan komoditas pertanian unggulan berbasis korporasi dan inovasi pertanian).
- Proyek akan difokuskan di 11 Provinsi, yaitu: Sumatera Utara (cabai, bawang merah, dan domba), Lampung (kopi), Sumatera Selatan (padi), Jawa Barat (domba dan bawang merah), Jawa Tengah (jeruk), Jawa Timur (mangga dan jeruk), Kalimantan Selatan (jeruk dan padi), Sulawesi Tenggara (kakao), Sulawesi Selatan (padi), Nusa Tenggara Timur (jagung), dan Nusa Tenggara Barat (jagung dan bawang merah).
- Total pembiayaan proyek: USD 100 juta (pinjaman luar negeri) dan USD 10 juta (Rupiah Murni Pendamping). Proyek akan dilaksanakan selama 60 bulan.
- *Executing agency*: Badan Litbang, Kementerian Pertanian

## PERTEMUAN VIRTUAL ASEAN SPS *CONTACT POINT* (ASCP) KE-8 DAN ASEAN *COMMITTEE ON SPS* (AC-SPS) KE-10 TAHUN 2020



Pertemuan ASEAN SPS *Contact Points* (ASCP) ke-8 dan ATIGA *Committee on Sanitary and Phytosanitary* (AC-SPS) ke-10 telah diselenggarakan tanggal 29-30 Juni 2020 melalui *Video Conference* oleh Brunei Darussalam sebagai *Host Country*. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Pusat KKIP, Badan Karantina Pertanian dan dihadiri unsur Kementerian Perdagangan; BPOM, dan BKIPM. Sementara pertemuan AC-SPS ke-10, DELRI dipimpin oleh perwakilan Kementerian Perdagangan.

Beberapa posisi Indonesia yang menjadi pembahasan pada pertemuan ini adalah Indonesia telah menyampaikan update peraturan perundangan terkait *Protocol 8: Sanitary and Phytosanitary of the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit* ke Sekretariat ASEAN dan peraturan terkait SPS beserta *Contact Point* ASCP ke Sekretariat ASEAN. Selain itu, Indonesia juga menyampaikan daftar *Contact Points* dan *National Experts* AC-SPS ke Sekretariat ASEAN.

Selama 2019 Indonesia telah menyampaikan 14 notifikasi. Pada tahun 2020 (sampai dengan 19 Juni-2020), sudah ada 35 notifikasi di mana 19 notifikasi disampaikan melalui ASEAN *Rapid Alert System for Food and Feed* (ARASFF) pada tahun ini.

Indonesia perlu melihat kembali kegiatan yang berhubungan dengan implementasi Artikel 84 dan 85 yang dilakukan dengan negara anggota ASEAN lainnya selama rentang waktu 2015-2020.

### AGENDA PERTEMUAN ASCP DAN AC-SPS

2021

- the 9th ASCP di Kamboja
- the 11th AC-SPS di Kamboja
- the 5th ASEAN-China SPS *Cooperation Technical Working Group (TWGs) Meeting on Animal Inspection and Quarantine, and Plant Inspection and Quarantine, and Food Safety* di Kamboja

2022

- the 10th ASCP di Indonesia

2023

- the 11th ASCP di Laos

## PENINGKATAN KUALITAS EKSPOR BIDANG TANAMAN MELALUI ASEAN SECTORAL WORKING GROUP ON CROPS (ASWGC) KE-27

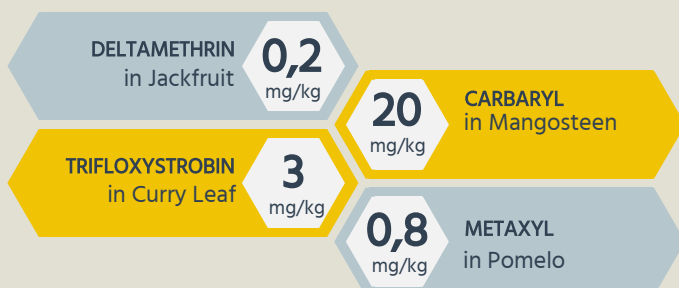
Sempat tertunda karena pandemi COVID-19, pertemuan rutin ASEAN Sectoral Working Group on Crops (ASWGC) ke-27 diselenggarakan secara virtual. Filipina menjadi tuan rumah pertemuan ASWGC yang diadakan pada tanggal 14 Juli 2020. Pertemuan dihadiri oleh delegasi *National Focal Point* dari Negara-Negara Anggota ASEAN (AMS) serta Sekretariat ASEAN, ASEAN Regional Diagnostic Network (ARDN) Phase II dan *International Rubber Consortium Limited* (IRCo).

ASWGC merupakan kelompok kerja ASEAN di bidang tanaman yang mengawal kerja sama ASEAN sub-sektor tanaman. Target kerja sama ASWGC adalah untuk mempromosikan pembangunan sektor tanaman di wilayah ASEAN dengan mengidentifikasi bidang kerja sama di antara AMS serta dengan mitra pembangunan lainnya.

Pertemuan ASWGC ke-27 diketuai oleh Mr. Gerge Y. Culaste, dari Kementerian Kerja Sama dan Pertanian Thailand. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Pejabat Ditjen Hortikultura dan dihadiri pula oleh wakil dari Kementerian Perdagangan serta unit teknis lingkup Kementan.

Pertemuan membahas isu harmonisasi kebijakan *phytosanitary* di ASEAN dan menyepakati ASEAN *Guidelines for Intra ASEAN Phytosanitary* untuk impor buah rambutan dan buah kelapa konsumsi dan olahan sebagai **key deliverables** ASWGC tahun 2021.

Dokumen di bawah ASEAN *Harmonised Maximum Residue Limits (MRLs) of Pesticides* juga telah disetujui antara lain:



Pertemuan ASEAN Sectoral Working Group on Crops (ASWGC) ke-27

Selain itu, forum ini juga membahas promosi dan pelaksanaan ASEAN *Good Agricultural Practices* (GAP). Saat ini Indonesia, Myanmar, Filipina, Singapura dan Thailand sedang dalam proses revisi *national standard for food safety* agar selaras dengan *Food Safety Module of ASEAN GAP*. Draft teks *Multilateral Arrangement for the Mutual Recognition of Agri-food Standards and Conformity Assessment* (MAMRASCA) juga turut dibahas dalam pertemuan ini. Pertemuan menyetujui periode waktu bagi AMS untuk mempertimbangkan dan melakukan konsultasi internal dengan badan-badan terkait mengenai pembentukan IRCo.

ASWGC akan menyampaikan beberapa laporan diantaranya *Intra ASEAN Phytosanitary Guidelines for Importation of Mangosteen* dan *ASEAN Plan of Action for Fall Armyworm (FAW) Control 2020 – 2025* untuk disetujui pada pertemuan **the Special SOM-41st AMAF** yang akan diselenggarakan tanggal 5 Agustus 2020 secara virtual.

Melalui forum ini, Indonesia dapat memanfaatkan hasil-hasil pertemuan yang telah disepakati khususnya dalam penerapan ASEAN GAP, proyek-proyek kerja sama ASEAN dengan mitra guna meningkatkan daya saing komoditas perkebunan dan hortikultura yang berorientasi ekspor.

## ENGLISH LANGUAGE TRAINING FOR OFFICIALS PROGRAMME (ELTO), KERJA SAMA DENGAN NEW ZEALAND



New Zealand English Language Training for Officials  
Intake 53, June 2020

Program NZELTO telah dimulai sejak tahun 1992 di Selandia Baru. Sampai saat ini jumlah peserta yang telah mengikuti program tersebut telah mencapai sekitar 1.700 peserta yang terdiri dari institusi pemerintah dari tujuh negara di Asia. Program bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan negara-negara peserta NZELTO yaitu Indonesia, Kamboja, Laos, Myanmar, Timor-Leste dan Vietnam, dan Mongolia.

Program ELTO *intake* 53 berlangsung pada tanggal 21 Januari 2020 s.d 26 Juni 2020 di New Zealand. Perwakilan Indonesia terdiri atas unsur Kementan (cq. Biro Kerja Sama Luar Negeri dan Pusat Data dan Informasi) serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Program beasiswa NZELTO berada di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan New Zealand yang dikelola secara langsung oleh *Accent Learning* yang dibentuk oleh *Victoria University of Wellington*, institusi yang menjalankan administrasi dan teknis program NZELTO.

Guna mendukung dan memperkuat materi pembelajaran terkait peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, penyampaian materi dilakukan melalui kunjungan lapang maupun kelas, serta ditunjang dengan berbagai kegiatan seperti tinggal bersama penduduk asli setempat (*homestay*) selama dua bulan dan pendampingan oleh *conversation partner (native)* selama tiga bulan.

Diharapkan peningkatan kemampuan pegawai yang didapatkan melalui pelatihan dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tupoksi terutama yang berkaitan dengan kerja sama luar negeri terkait pertanian dan perdagangan.



## HIGHLIGHTS BIRO KLN

### Sinkronisasi Pengelolaan Hibah Luar Negeri Selaraskan RPJMN 2020-2024

Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian, telah melaksanakan Sinkronisasi Pengelolaan Hibah Luar Negeri Lingkup Kementan pada tanggal 26 Juni 2020 di PPMK Bogor Jawa Barat. Pertemuan bertujuan untuk mensinkronisasikan kegiatan hibah luar negeri agar selaras dengan indikator *output* Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.

Selain dilaksanakan secara tatap muka, pertemuan juga diadakan secara virtual dan dihadiri oleh sekitar 100 peserta. Acara dipimpin langsung oleh Dr. Ade Candradijaya, Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementan dan dihadiri oleh perwakilan dari Bappenas, Kemenkeu, Ditjen Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Litbang Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Badan Ketahanan Pangan, Ditjen Perkebunan, Perwakilan JICA, Perwakilan GIZ, dan para satker pengelola kegiatan hibah luar negeri.

Pada pertemuan tersebut perwakilan dari Kementan yang hadir mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan perkembangan kegiatan hibah yang dikelola. Beberapa poin penting yang disampaikan diantaranya terkait perkembangan hibah luar negeri yang dikelola Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementan yang semakin baik serta dukungan hibah LN untuk Program Korporasi Petani, *major project* penguatan jaminan usaha serta 350 korporasi petani dan nelayan, target *major project* korporasi petani, rancangan operasional korporasi petani dan pendekatan management korporasi petani.

Perwakilan dari Kemenkeu menyampaikan mengenai "Pengelolaan Hibah" yaitu dasar hukum hibah, prinsip penerimaan hibah, definisi hibah, proses hibah langsung dan mekanisme pertanggungjawaban hibah barang dan jasa.



Kepala Biro KLN Kementan bersama narasumber dari Kementerian Keuangan dan Bappenas



Peserta Sinkronisasi Pengelolaan Hibah Luar Negeri Lingkup Kementan yang hadir ke PPMK - Ciawi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan COVID-19

Perwakilan dari Bappenas menyampaikan mengenai "Exit Strategy untuk Keberlanjutan Capaian Proyek Hibah Luar Negeri" yaitu arah kebijakan dan strategi pangan dan pertanian tahun 2020-2024, alur pikir pembangunan pangan dan pertanian RPJMN 2020-2024 per output, karakteristik PHLN, kriteria penggunaan PHLN dan *exit strategy* capaian proyek hibah.

Biro KLN akan menindaklanjuti pertemuan ini dengan menyelenggarakan pertemuan rutin untuk membahas *update* pengelolaan hibah luar negeri lingkup Kementan.

# HIGHLIGHTS BIRO KLN



“Indikasi Geografis (IG) adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.”

## Buku Profil Indikasi Geografis (IG) sebagai Sarana Promosi Produk Pertanian



Berdasarkan definisi Indikasi Geografis di atas, IG merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saat ini, produk pertanian yang telah mendapatkan sertifikasi IG ada sebanyak **67 produk** yang tersebar di 28 provinsi .

Untuk memudahkan pengenalan produk pertanian yang telah bersertifikasi IG, maka Kementerian Pertanian c.q. Biro Kerja Sama Luar Negeri menerbitkan Profil Indikasi Geografis (IG) Produk Pertanian Tahun 2020. Buku ini menyajikan data profil 67 IG produk pertanian yang mencakup: nama produk, logo, profil cita rasa, karakteristik dan kualitas, serta lingkungan geografis.

Diharapkan dengan adanya Buku Profil ini dapat membantu mempromosikan produk-produk pertanian

yang telah disertifikasi IG kepada negara mitra, organisasi internasional, dan pihak-pihak lain yang terkait maupun konsumen yang lebih luas. Selain itu, diharapkan buku ini dapat menumbuhkan minat dan dukungan Pemerintah Daerah yang mempunyai produk pertanian yang spesifik/khas untuk melakukan sertifikasi IG bagi produk-produk local di daerahnya. Selanjutnya diharapkan akan semakin membuka peluang kemitraan antara petani, pemerintah pusat, pemerintah daerah serta swasta dalam mengembangkan potensi produk IG ini.

### Sebagian produk pertanian yang sudah memiliki Sertifikat IG



## HIGHLIGHTS BIRO KLN

### Kajian *Nowcasting* Kemampuan Ketahanan Pangan Nasional dan Global dalam Menghadapi Pandemi

01.

#### Pengumpulan Data

- Data Statistik Industri Pangan
- Data Produksi Nasional 4 Subsektor Pertanian
- Data Ekspor - Impor
- Data Harga Komoditas

#### Pembahasan

Pembahasan mengenai kondisi cadangan pangan Indonesia, dampak pandemi, perdagangan dunia atas komoditas pangan

02.

03.

#### Hasil Kajian

Alternatif gambaran upaya mitigasi yang dapat diambil oleh *stakeholder* ketika menghadapi kemungkinan terburuk dari kondisi suplai bahan pangan saat pandemi COVID - 19 khususnya bagi petani (produsen)

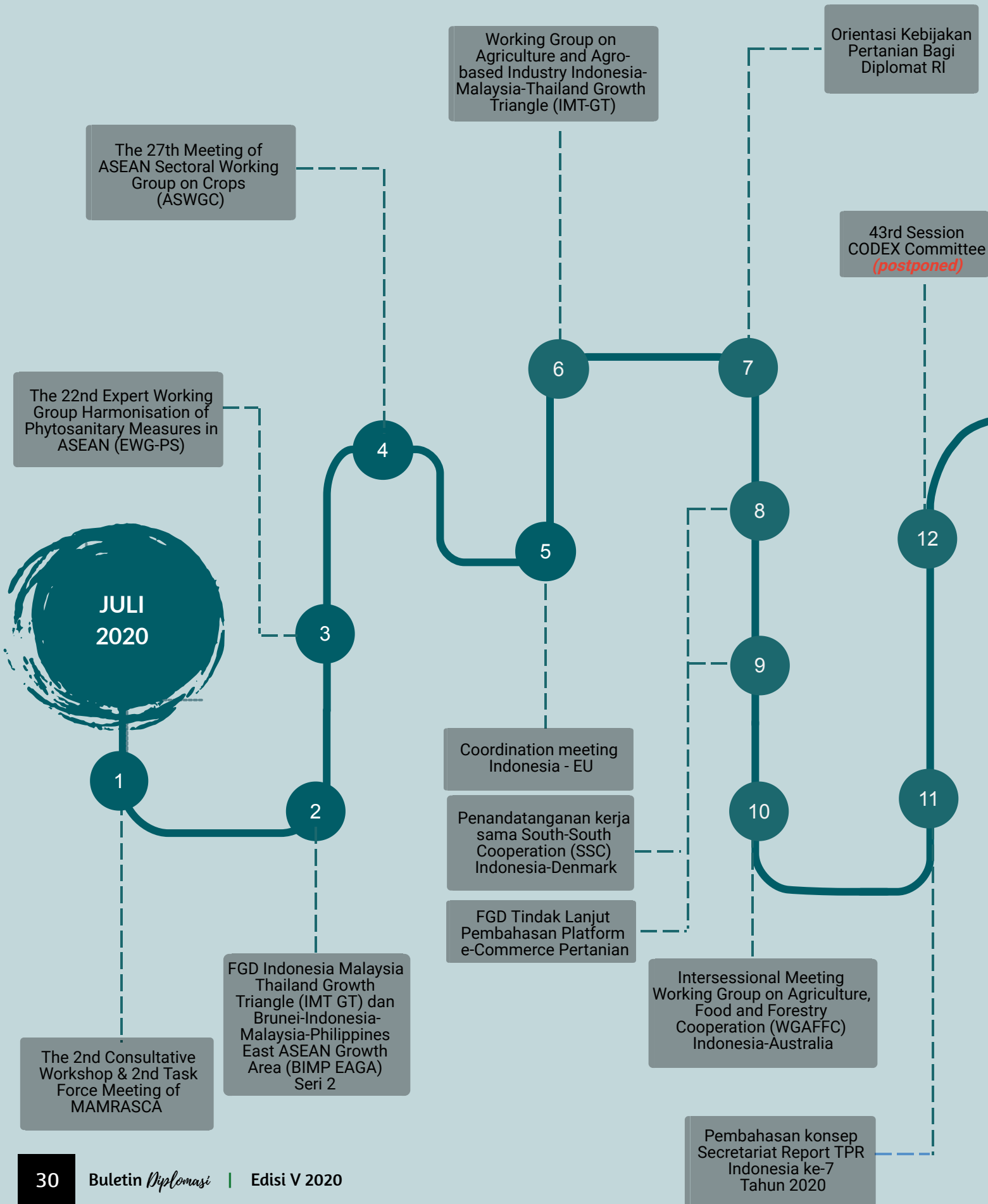
Sebagai upaya mengukur dampak pandemi COVID-19 terhadap *supply demand* produk pangan dan *value chain* industri pangan di Indonesia, Biro Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pertanian akan melakukan kajian mengenai kemampuan ketahanan pangan nasional dan global dalam menghadapi pandemi dengan menggunakan perspektif metode *nowcasting*.

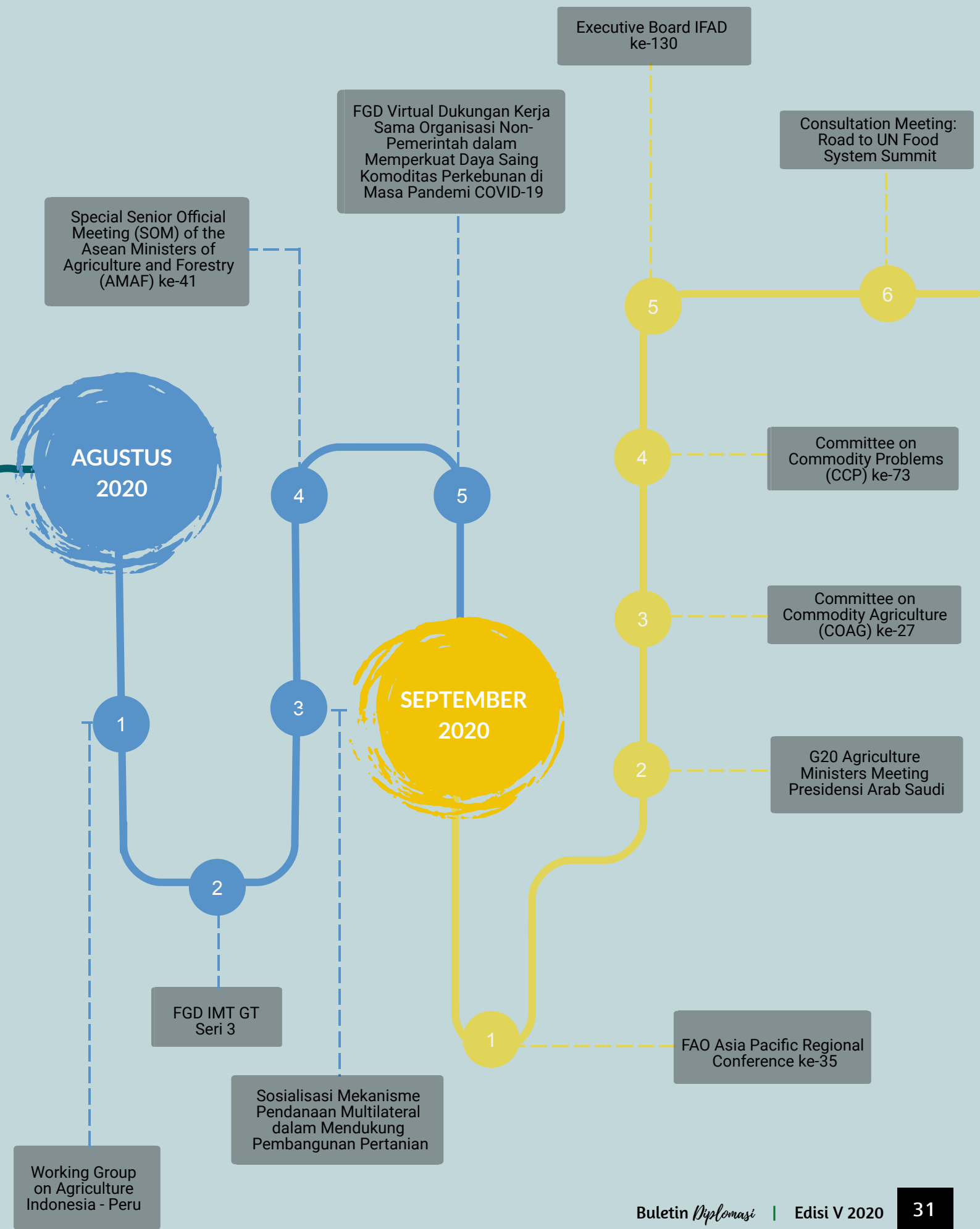
Sebagai langkah awal dari kajian tersebut diperlukan sejumlah data terbaru mengenai data statistik industri pangan (2018, 2019, TW I - II 2020 - bulanan), data produksi nasional keempat subsektor (2018, 2019, TW I - II 2020 - bulanan), data ekspor impor harian/ bulanan (2018, 2019, TW I - II 2020 - bulanan) dan data harga komoditas 2018, 2019, TW I - II 2020 - bulanan). Data - data tersebut akan memperkuat basis kajian secara lebih akurat. Pada pembahasan awal yang telah diselenggarakan oleh Biro KLN tanggal 1 Juli 2020, beberapa Direktorat Jenderal teknis lingkup Kementerian Pertanian telah menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan terlibat khususnya dalam penyediaan data - data terbaru yang dibutuhkan dalam kajian ini. Pada pembahasan awal tersebut digambarkan mengenai kondisi cadangan pangan Indonesia, dampak pandemi pada rantai nilai pangan, perdagangan dunia atas komoditas pangan dan konteks ketahanan pangan dari sisi Indonesia dan negara lainnya.

Hasil dari Kajian *Nowcasting* Kemampuan Ketahanan Pangan Nasional dan Global dalam Menghadapi Pandemi diharapkan akan mampu memberikan alternatif gambaran upaya mitigasi yang dapat diambil oleh *stakeholder* yang berkepentingan ketika menghadapi kemungkinan terburuk dari kondisi suplai bahan pangan saat pandemi COVID-19 khususnya bagi petani (produsen) yang berperan besar dalam menjamin produksi komoditas pangan dan membutuhkan jaminan pasar yang jelas dan berkelanjutan.

# AGENDA KEGIATAN BIRO KLN

## JUL-AGU-SEP 2020







Tim Redaksi Buletin

*Diplomasi*

Biro Kerja Sama Luar Negeri  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Pertanian  
Jl. Harsono RM No. 3, Gedung A Lt. 6  
Ragunan, Jaksel 12550  
email: publikasi.kln@gmail.com  
[www.pertanian.go.id](http://www.pertanian.go.id)